



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : PARDOMUAN NASUTION,SS, M.SP  
**Jabatan** : KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama :

**N a m a** : dr.SUSANTI DEWAYANI, Sp.A  
**Jabatan** : WALI KOTA PEMATANG SIANTAR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Siantar,

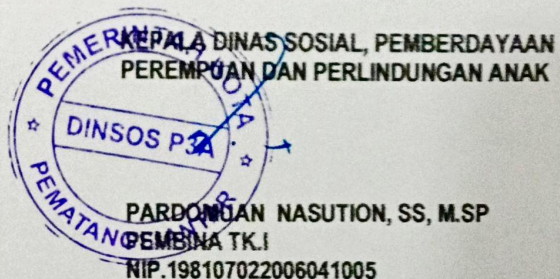
2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama



dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp.A



PARDOMUAN NASUTION, SS, M.SP  
PEMBA T.K.I  
NIP.198107022006041005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100%
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %
2.	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	Persentase OPD yang telah melakukan penganggaran yang Responsif Gender	50 %
3.	Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0,02 %
4.	Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak	Persentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan	0.01 %
		Persentase Korban Kekerasan Anak yang mendapat layanan	100 %
5.	Meningkatnya Pelayanan dan Tatakelola Perangkat Daerah	Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.587.662.562
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	200.941.155
3.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	296.643.376
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.054.277.495
5.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	170.249.108
6.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	21.630.300
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	109.116.962
2.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	538.937.451
3.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	272.837.448
	TOTAL	7.252.295.857

Pematang Siantar,

2023



dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp.A



KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PARDONIAN NASUTION, SS, M.SP  
PEMBINA TK.I  
NIP. 198107022006041005